

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Era New Normal, Investasi Sektor Industri Tetap Dikawal

Jakarta - Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan investasi sektor industri di tanah air, baik itu datangnya dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA). Hal ini guna tetap memacu roda perekonomian nasional, meskipun sedang dalam tekanan berat akibat dampak pandemi Covid-19.

■ NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan bahwa pemerintah tengah bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan kami senantiasa mengawal masuknya investasi di Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait berupaya memastikan proses penanaman modal oleh para calon investor bisa berjalan tanpa hambatan. Agar investasi tersebut dapat teralisasi cepat, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari deregulasi hingga pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

"Di tengah kondisi sulit seperti saat ini, karena adanya wabah korona, kami juga sudah mengusulkan berbagai stimulus agar industri kita bisa meningkatkan produktivitasnya. Sebab, aktivitas manufaktur selama ini memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian na-

sional, seperti dari capaian nilai investasi dan ekspor," papar Agus.

Agus menjelaskan, Kemenperin mencatat sektor industri masih menjadi penyumbang paling besar terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 19,98% pada triwulan I tahun 2020. Walaupun diterima dampak pandemi Covid-19, ekspor dari industri pengolahan selama tiga bulan pertama tahun ini mampu menyeter hingga 78,96% terhadap total nilai ekspor nasional yang mencapai USD41,78 miliar.

Bahkan, sepanjang Januari-Maret 2020, total penanaman modal sektor manufaktur menyentuh angka Rp64 triliun atau naik 44,7% dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp44,2 triliun. Nilai investasi industri manufaktur di kuartal I-2020 tersebut memberikan kontribusi signifikan hingga 30,4% dari total investasi keseluruhan sektor yang menembus Rp210,7 triliun.

"Masuknya investasi ju-

ga akan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri serta memberikan nilai tambah bagi bahan baku lokal dan mendorong daya saing industri kita. Selain itu, mendukung pembangunan daerah dan memberikan efek yang luas pada pembukaan lapangan kerja. Hingga saat ini, total penyerapan tenaga kerja di sektor industri lebih dari 18,87 juta orang," imbuh Agus.

Sehingga, menurut Agus, Indonesia perlu menangkap peluang investasi dari berbagai negara potensial, terutama mereka yang ingin mere-lokasi pabriknya seperti beberapa perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. "Oleh karenanya, kita harus benar-benar persiapan dengan matang, termasuk ketersediaan kawasan industri dan infrastruktur yang terintegrasi," tegas Agus.

Apalagi, kata Agus, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi karena memiliki keunggulan dari letak geografis dan pasar domestik yang besar sehingga dapat dijadikan hub manufaktur di wilayah ASEAN. Daya tarik lainnya bagi investor, Indonesia telah menyatakan kesiapan dalam menerapkan industri 4.0 karena produksi akan lebih berkualitas dan efisien dengan penggunaan teknologi terkini.

Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam kurun lima tahun terakhir, se-

jak 2015 hingga triwulan I-2020, investasi di industri makanan menjadi stkor yang tertinggi menggelontorkan dananya di tanah air dengan nilai mencapai Rp293,2 triliun atau berkontribusi 21,7% dari total investasi sektor manufaktur sebesar Rp1.348,9 triliun.

Sektor berikutnya adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 dan triwulan I 2020 dengan total investasi mencapai Rp266,7 triliun. Selanjutnya, industri kimia dan farmasi berada di peringkat ketiga dengan nilai investasi Rp243,9 triliun.

"Salah satu sektor yang sedang kami genjot investasinya adalah industri farmasi. Hal ini sejalan dengan target kemandirian sektor kesehatan, baik industri farmasi maupun industri alat kesehatan," jelas Agus.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani sebaiknya memang pemerintah dapat membantu sektor industri, karena jumlahnya dan perannya terhadap PDB cukup signifikan.

"Kami juga berterima kasih kepada Bapak Menteri karena telah mengirimkan surat ke PLN, semoga bisa direpons cepat. Sebab, anggota kami masih harus bayar minimum charge, padahal sedang tutup atau turun kapasitas," ungkap Hariyadi. ● iwan/gro



ALAT RAPID TEST COVID-19 BUATAN DALAM NEGERI : Direktur Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mulyanto yang juga menjadi salah seorang peneliti menunjukkan prototipe alat tes diagnostik cepat (rapid test) RI-GHA COVID-19 yang diproduksi di Laboratorium Hepatika Bumi Gora di Mataram, NTB, Senin (1/6/2020). Alat rapid test RI-GHA (Republik Indonesia-Gadajha Mada, Hepatika Mataram-Airlangga) COVID-19 tersebut merupakan produk dalam negeri yang melibatkan para peneliti dari Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram yang masih dalam tahap uji validasi hingga akhir Juni ditargetkan sudah bisa diproduksi secara massal.

Cegah Meluasnya Covid-19, Ini Terobosan Kemenperin

NERACA

Jakarta - Pelaku usaha menyambut baik sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mendukung aktivitas sektor industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi Covid-19. Bahkan, sebagai pembina industri, Kemenperin juga mengusulkan berbagai stimulus untuk kembali menggerakkan iklim usaha di tanah air.

Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) yang dapat menjamin industri untuk tetap produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. "IOMKI memiliki peran penting dalam upaya mengairahkan sektor industri di dalam negeri tetap produktif, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan," kata Jongkie.

Jongkie menambahkan, industri otomotif siap menjalankan kebijakan strategis yang diarahkan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan sektor industri dan ekonomi nasional, terutama dalam tatanan new normal nanti. "Kami berharap industri akan segera pulih. Untuk itu, kami bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenperin yang terus memonitor situasi dan kondisi di lapangan untuk menyiapkan langkah-langkah perbaikan, termasuk di sektor industri otomotif," tutur Jongkie.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, Dorodjatun Sanusi mengatakan, dengan adanya dukungan dari Kemenperin dan kementerian/lembaga terkait lainnya, sektor industri farmasi dapat terus beroperasi dan berproduksi. Bahkan, kinerjanya mampu positif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2020, industri kimia, farmasi dan

obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen. Selain itu, mengenai distribusi produk, khususnya ke daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat terus didukung oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar.

"Pemberian IOMKI yang dilakukan Kemenperin merupakan langkah positif dan mampu membantu operasional sektor industri farmasi di tengah wabah Covid-19 sehingga kami dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam rangka penanganan Covid-19. Operasional di sektor farmasi juga tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah diputuskan oleh pemerintah," papar Dorodjatun.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong operasional sektor industri nasional di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Namun demikian, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah setiap kegiatan industri harus dijalankan dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 17 ribu IOMKI yang telah dikeluarkan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawa-

san industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). "Sesuai Surat Edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2020, perusahaan yang memiliki IOMKI wajib melaporkan implementasi protokol kesehatan seminggu sekali, dan ada sanksi untuk pelanggaran aturan ini," jelas Agus.

Selanjutnya, Kemenperin juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan industri yang masih beroperasi. Adapun untuk memantau penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di perusahaan industri, Agus juga telah menunjuk beberapa sektor industri, di antaranya PT Kahindah Citra Garment dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Jakarta, serta PT Daehan Global Brebes di Jawa Tengah.

"Alhamdulillah, hingga saat ini belum ada laporan dari pemerintah provinsi yang meminta Kemenperin untuk mencahut IOMKI dari perusahaan industri. Namun demikian, kita terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan pembinaan agar perusahaan industri dapat terus mematuhi protokol kesehatan," ungkap Agus. ● iwan/gro

Progres RDMP Balikpapan Pertamina Telah Capai 16,32%

NERACA

Jakarta - Di tengah pandemi Covid-19, Pertamina tetap menuntaskan proyek strategis nasional, salah satunya RDMP Balikpapan yang saat ini progressnya telah mencapai 16,32%. Progres ini naik dari capaian triwulan 1-2020 yang tercatat 15,02%.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan, progress RDMP Balikpapan saat ini masih on the track, meskipun dalam pelaksanaan pengerjaannya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Megaprojek RDMP dan GRR merupakan proyek strategis nasional yang telah ditetapkan untuk terus dijalankan di tengah pandemi covid-19 serta fluktuasi har-

ga minyak mentah dan kurs rupiah terhadap dollar. Proyek ini penting untuk memastikan ketahanan dan kemandirian energi nasional dapat segera terwujud," ujar Fajriyah.

Fajriyah menambahkan, progress RDMP Balikpapan per 17 Mei 2020 meliputi empat pekerjaan yakni engineering (6,05%), Procurement (5,85%), Construction (4,38%) dan Commissioning (0,03%) sehingga secara keseluruhan mencapai 16,32%.

Proyek RDMP dan GRR secara keseluruhan, tambah Fajriyah, saat ini mengerjakan sekitar 5.000 tenaga kerja dimana mayoritas di RDMP Balikpapan. Pada umumnya pekerja di RDMP Balikpapan berasal dari pekerja lokal, sehingga Pertamina harus terus men-

jaga keberlangsungan proyek ini agar ekonomi masyarakat di wilayah operasi bisa terus tumbuh dan bergerak maju.

RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari serta meningkatkan kualitas produk BBM dari setara Euro II menjadi setara Euro V. Proyek RDMP Balikpapan juga disinergikan dengan pembangunan New Crude Lave-Lawe Tankage Facility dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2 juta barel.

Sejalan dengan The New Normal, Pertamina telah menyiapkan Protokol Perlindungan Covid-19 untuk melindungi pekerja, pelanggan, pemasok serta mitra bisnis. Penerapan Protokol tersebut antara lain

dengan mewajibkan penggunaan masker, sarung tangan, jaga jarak (social distancing) serta penyemprotan disinfektan pada seluruh area operasi.

"Dengan dukungan seluruh stakeholder, Pertamina akan terus menuntaskan megaprojek RDMP dan GRR sesuai target. Harapannya, pada tahun 2026, kita sudah mandiri dengan tidak lagi mengimpor BBM," papar Fajriyah.

Disisilai, pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dengan kapasitas 1760 MW ("Proyek Jawa-1") yang rencananya akan Commercial Operation Date (COD) pada akhir tahun 2021, saat ini telah mencapai progres 71% per April 2020. ● iwan/gro

Cegah Covid-19, Pemerintah Perketat Penumpang Pesawat

NERACA

Jakarta - Stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta memperkuat sinergi selama periode pembatasan penerbangan melalui pembentukan Gugus Tugas Penanganan Akselerasi Penanganan Covid-19 Soekarno-Hatta Covid-19.

Ketua COVID-19 Handling Acceleration Task Force Letnan Jenderal Doni Monardo menunjuk Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin untuk menjalankan Gugus Tugas Penanganan COVID Soekarno-Hatta.

Kemudian, dalam struktur, Muhammad Awaluddin berada di posisi Ketua dan menunjuk Manajer Umum Eksekutif Bandara Soekarno-Hatta Agus Harjadi sebagai Kepala Eksekutif Satuan Tugas Covid-19 Soekarno-Hatta.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Perhubungan No. 09/2016 yang menyatakan bahwa harus ada satu akuntabel (akuntabilitas tunggal) dalam operasi bandara. Satu-satunya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Manajer Umum Eksekutif Bandara Soekarno-Hatta. "Soekarno-Hatta memiliki peran yang sangat vital di tengah pandemi ini, salah satunya adalah untuk mempercepat penanganan Covid-19. Oleh karena itu,

operasi Soekarno-Hatta saat ini didukung atau didukung oleh Soekarno-Hatta Covid-19 Gugus Tugas Percepatan Penanganan," kata Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.

Satuan Tugas Akselerasi Penanganan Covid-19 Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari berbagai elemen yaitu Otoritas Bandara Wilayah I, PT Angkasa Pura II, Kantor Kesehatan Pelabuhan - Kementerian Kesehatan, Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, dan TNI/Polri.

Gugus tugas ini juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Udara dari Gugus Tugas Penanganan Akselerasi COVID-19 Nasional, dan memiliki tugas untuk memastikan pengoperasian Bandara Soekarno-Hatta selalu mengacu pada lima hal. Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18/2020 tentang Kontrol Transportasi untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H.

Ketiga, Sirkuler Satuan Tugas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 No. 04/2020 tentang Kriteria untuk Membatasi Perjalanan Orang-Orang Agar Percepatan Penanganan COVID-19. Keempat, Surat Edaran

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan No. 32/2020 tentang Pedoman Operasional Transportasi Udara untuk Melaksanakan Pembatasan Perjalanan dalam Konteks Percepatan Penanganan Covid-19.

Kelima, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/20 tentang Protokol Kesehatan untuk Penanganan Warga Negara Indonesia dan Kedatangan Orang Asing di Pintu Masuk Negara dan Wilayah dalam Situasi Pembatasan Sosial Skala Besar.

Setelah ini, gugus tugas kemudian menetapkan berbagai prosedur, salah satunya adalah menangani keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat. "Fokusnya sekarang memang untuk mengimplementasikan ketentuan SE 04/2020 terkait dengan keberangkatan penumpang domestik dan SE Menteri Kesehatan 313/2020 tentang kedatangan penumpang internasional," kata Muhammad Awaluddin.

Setiap hari saat ini terdapat 239 personel yang ditugaskan ke Gugus Tugas Penanganan Akselerasi COVID-19 Soekarno-Hatta yang secara khusus mengawasi jalannya prosedur keberangkatan penumpang rute domestik dan kedatangan penumpang internasional. ● iwan/gro

KETERANGAN		31 Des 2019	31 Des 2018	KETERANGAN		31 Des 2019	31 Des 2018
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Rupiah)							
ASET				LIABILITAS DAN EKUITAS			
ASET LANCAR				LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kas dan setara kas	9.071.210.210	1.221.278.302		Utang usaha	1.109.587.080	1.005.369.190	
Piutang usaha	15.993.476.486	15.599.420.157		Utang lain-lain	202.032.000	227.747.418	
Piutang lain-lain	54.000.000	73.500.000		Beban akrual	2.339.817.403	1.589.299.674	
Piutang kepada pihak berelasi	47.500.000			Utang pajak	1.116.342.073	1.781.761.658	
Persediaan	20.058.454.756	16.717.461.089		Utang kepada pemegang saham	761.960.000	3.014.861.987	
Pajak dibayar di muka	621.459.194	328.288.459		Bagian lancar atas Liabilitas pembiayaan konsumen	531.727.200	579.754.444	
Biaya dibayar di muka	180.419.882	295.200.106		Total liabilitas jangka pendek	6.061.465.756	8.198.794.371	
Uang muka pembelian	2.720.134.091	2.793.557.151		LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Total aset lancar	48.746.654.619	37.028.705.264		Obligasi konversi	-	18.100.000.000	
ASET TIDAK LANCAR				Liabilitas pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian lancar	367.676.384	899.404.120	
Aset pajak tangguhan	170.678.244	110.892.765		Liabilitas imbalan kerja	682.712.976	443.571.060	
Aset takberwujud	6.400.000	8.800.000		Total liabilitas jangka panjang	1.050.389.360	19.442.975.180	
Aset tetap, neto	33.063.936.951	34.992.357.474		TOTAL LIABILITAS	7.111.855.116	27.641.769.551	
Total aset tidak lancar	33.241.015.195	35.112.050.239		EKUITAS			
				Modal saham			
				Modal dasar - 1.000.000.000 lembar saham (2019) 100.000 lembar saham (2018) dan nilai nominal Rp 100 (2019) nilai nominal Rp 1.000.000 (2018) per lembar saham	41.800.000.000	25.000.000.000	
				Modal ditempatkan dan di setor penuh 418.000.000 lembar saham (2019) dan 25.000 lembar saham (2018) dan nilai nominal Rp 100 per lembar saham (2019) nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham (2018)	19.352.671.523	15.739.594.600	
				Tambahan modal disetor, neto	13.775.827.818	3.821.224.319	
				Saldo laba	(52.684.643)	(61.832.967)	
				Penghasilan (rugi) komprehensif lain			
				TOTAL EKUITAS	74.675.814.696	44.498.985.952	
TOTAL ASET	81.987.669.814	72.140.755.503		TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	81.987.669.814	72.140.755.503	